

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- A.Garner, Bryan (ed), 1999,*Blacks Law Dictionary*, St. Paul Minn, New York.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori –Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Garfindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet ke-5 Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- C. S.H., M.H. Evan, 2016, *PRIVATISASI PENJARA; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta.
- Didin Sudirman, 2004, *Sosiologi Penjara*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademii Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2015, *Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Dwidja Priyatni, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- H.R.S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya.
- Hisyam Ikhtias. *Repitisi Kematian dalam Penjara Malfungsi Pemasyarakatan*. Seri Monitor dan Dokumentasi 2019 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakatan.Koesnoen, A. 1969, *The Standard Minimum Rules*, Jakarta, Dirjen Bina Tuna Warga

- Lamintang, P.A.F, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Parwadminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Poernomo, Bambang, 1984, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Prof. Dr. Wirjono Projdodikoro, 2003, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.
- Radjab, Suryadi, 2002, *Dasar – dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PBHI.
- Samosir, Djisman, 2012, *Sekelumit Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Shidarta dan Sulistyowati Irianto, 2013, *Metode Pnelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simanjuntak, 2003, *Politik dan Praktik Pemasarakatan*, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Combination)*, Bandung, Alfabeta.
- Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Yogyakarta, Alumni.
- Syahrudin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*. Disertai. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal Hukum

- Andi Soraya Tenrisoji, 2013, *Pemenuhan Hak Narapidana dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB*
- Pare – Pare, *Makassar*, Jurnal Respiratory Unhas, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Handayani, Yeni. 2015. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal *RechtsVinding*.
- Herry Subondo.2007. *Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Indonesia dan Beberapa KUHP Asing* .Jurnal Ilmu Hukum Pandecta Imu Hukum Negeri Semarang.vol.3,No.2
- Ismail Rumadan, “*Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2 (2), 2013. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.
- Jurnal dari Erepo Unud, 2016. *Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia*. <http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana. Diakses pada 7 Januari 2018.
- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, *Implementasi Pengaturan Hak – hak Narapidana Melalui The Nelson Mandela Rules di Indonesia*. Justitia, hlm 254. Diakses pada 28 Januari 2022. Vol 7 No. 3 Tahun 2020.
- Lidya Suryani Widayati, “*Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*,” Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII.
- Miftahul Qodri, “*Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum*”, Benang Merah , Jurnal Hukum Progresif Vol.7, No. 2, Oktober 2019.
- Nazaryadi, “*Pemenihan Hak Kesehatan Narapidana*,” Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1(1), April 2017, FH Universitas Syiah Kuala.
- Situmorang, Victori H., “*Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13(1), 2019.
- Penny Naluria Utami, “*Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*” Jurnal Penelitian *De Jure*, Vol 17, 2017.

Internet

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 22 September 2021 diakses pukul 21.17 WIB

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> tanggal 29 November 2021

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> tanggal 26 Desember 2021 diakses pukul 21.06 WIB

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
(Pasal 3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
(Pasal 18)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB dan HIV)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.258.PK.01.06.01
Tahun 2017 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana bagi
Narapidana, Tahanan dan Anak.

